

Pengaruh *Local Government Wealth*, *Intergovernmental Revenue* dan Opini Audit Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia Secara *Online*

Dewi Lesmanawati

Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) MAB , Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

ARTICLE INFO

Article history:

Received 6 November 2019

Revised 4 Desember 2019

Accepted 12 Desember 2019

Keywords:

Disclosure of Online Financial Statements, Local Government Wealth, Intergovernmental Revenue and Audit.

ABSTRACT

The aim of this article is to examine the extent of the influence of local government wealth, intergovernmental revenue and audit opinion on disclosure of online financial statements of provincial governments in Indonesia.. The data of this research comprise 128 out of 32 provincial governments in Indonesia during 2014-2017, using purposive sampling method. The analysis techniques used were logistic regression. The results of this study show that the local government wealth and intergovernmental revenue has positive significant influence on disclosure of online financial statements, while audit opinion do not have significant influence on disclosure of online financial statements.

ABSTRAK

Tujuan artikel ini adalah untuk menguji sejauh mana pengaruh local government wealth, intergovernmental revenue dan opini audit terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia secara online. Data penelitian ini terdiri dari 128 dari 32 pemerintah provinsi di Indonesia selama tahun 2014-2017, menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa local government wealth dan intergovernmental revenue berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan online, sedangkan opini audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan online.

1. PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik yang tertera dalam Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun (2008) menyebutkan “setiap informasi publik harus bersifat terbuka, serta dapat diakses oleh pengguna secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana.” Hal ini menjadi perhatian terkait perlunya transparansi informasi pemerintah kepada publik. Selain regulasi di atas, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 56 tahun (2005) tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah menyatakan bahwa “pemerintah daerah (pemda) berkewajiban untuk meman-faatkan dan mengembangkan kemajuan teknologi informasi untuk menyalurkan informasi keuangan melalui situs resmi (website) masing-masing.” Sebagai entitas pelaporan, pemda wajib menyediakan sarana komunikasi efektif dan efisien agar dapat menyampaikan informasi kepada publik.

Saat ini hampir seluruh pemda di Indonesia baik tingkat provinsi, kabupaten dan kota telah memiliki situs resmi (*website*). Verawaty (2015) mengemukakan bahwa ada kesenjangan praktik keterbukaan informasi terkait keuangan melalui *e-government* dan mayoritas pemda belum mengoptimalkan penggunaan teknologi internet. Padahal kewajiban pemda adalah membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Ada beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi pemda ketika melakukan pengungkapan laporan keuangannya secara online. Laswad et al. (2005), pengungkapan pelaporan keuangan yang dipublikasikan secara online dapat dipengaruhi oleh *local municipal wealth*. Salah satu

* Corresponding author, email address: dewilesmanawati80@gmail.com

kinerja yang bisa dinilai dari pemerintah daerah bisa dilihat dari kekayaan pemerintah daerah. Pemerintah tidak perlu khawatir untuk mengungkapkan informasi keuangannya jika memang kinerjanya baik. Biasanya ada kecenderungan bagi pemerintah yang kekeayaannya kecil untuk membatasi informasi keuangannya pada *stakeholder*-nya secara *online* (Craven dan Martson, dalam (Laswad et al., 2005). Gandia (2008) berpendapat bahwa *public municipal wealth* perlu dihubungkan dengan optimalisasi pengungkapan informasi karena memberikan sinyal kualitas manajemen yang lebih baik dalam pengelolaannya.

Selain bagaimana mengelola kekayaannya dengan baik, pemerintah daerah juga perlu mengelola pendapatan daerah dari transfer pemerintah pusat. Patrick (2007), menyatakan *intergovernmental revenue* merupakan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah untuk pembiayaan operasional pemerintah di daerahnya. Dana tersebut digunakan dan dialokasikan sesuai anggaran yang telah dibuat. Peningkatan pengungkapan informasi keuangan biasanya didorong oleh oleh semakin besarnya *intergovernmental revenue*, hal ini disebabkan bentuk tanggungjawab pemda kepada pihak pemerintah pusat atas pengelolaan keuangannya.

Di Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan auditor eksternal yang melakukan proses audit terhadap laporan keuangan pemda. Hasil akhir audit BPK atas laporan keuangan adalah opini audit, opini audit diberikan atas laporan keuangan yang disusun oleh pemda. Opini menjadi salah satu indikator kualitas laporan keuangan yang disusun oleh pemda. Menurut Handayani (2010), opini audit dapat memengaruhi publikasi pelaporan keuangan pemerintah secara *online*. Peningkatan penyimpangan dalam penyusunan laporan keuangan pemda, akan berdampak pada adanya kecenderungan pemerintah daerah akan menutupi informasi yang disajikan, sehingga ada kecenderungan untuk tidak mengungkapkannya secara *online* di internet.

Penelitian lain seperti yang dikemukakan oleh Nor, Hudaya dan Novriyandana (2019) bahwa opini audit berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan di situs web pemda di Indonesia, sementara temuan audit, tindak lanjut rekomendasi audit, tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan dan komitmen kepala pemda tidak ada pengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan situs web pemda di seluruh Indonesia.

2. TELAHAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Menurut Mulgan (1997), "*dalam konteks sektor publik bisa diilustrasikan bahwa hubungan antara masyarakat dengan pemerintah adalah seperti hubungan antara prinsipal dan agen. Masyarakat adalah prinsipal dan pemerintah adalah agen. Prinsipal memberikan wewenang pengaturan kepada agen dan memberikan sumber daya kepada agen (dalam bentuk pajak dan lain-lain). Sebagai wujud pertanggungjawaban atas wewenang yang diberikan, agen memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap prinsipal. Karena tidak mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh agen (terjadi asimetri informasi) maka prinsipal membutuhkan pihak ketiga yang mampu meyakinkan prinsipal bahwa apa yang dilaporkan oleh agen adalah benar.*" Jika dihubungkan dengan pengungkapan laporan keuangan secara *online* maka dapat dijelaskan bahwa pemerintah sebagai agen perlu memberikan informasi terkait laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban ke masyarakat sebagai prinsipal melalui media *online* untuk kemudahan akses informasi.

Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Secara *Online*

Pengungkapan data keuangan saat ini perlu menggunakan teknologi dan jaringan internet untuk mempermudah akses bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Dâmaso & Lourenço, 2001). Sehingga perkembangan sistem teknologi informasi akan berdampak pada sistem pemerintahan di Indonesia. Saat ini, berbagai aktivitas pengelolaan keuangan dalam pemerintahan baik pusat maupun daerah telah didukung oleh sistem teknologi yang memadai. Penyajian laporan keuangan secara tepat dan cepat merupakan tujuan akhirnya.

Melalui penyajian laporan keuangan secara tepat waktu melalui penggunaan teknologi secara tepat maka diharapkan pemerintah dapat mengoptimalkan keterbukaan dan pertanggung-jawaban laporan keuangan daerah kepada publik. Teknologi seperti internet dapat digunakan untuk melaporkan laporan keuangan. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa "*badan publik harus bersifat terbuka dan bertanggung-jawab atas setiap informasi publik.*"

Pengaruh *Local Government Wealth* terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Secara Online

Menurut Trisnawati dan Achmad (2014) kekayaan daerah merupakan gambaran kemakmuran suatu daerah. Pada daerah yang memiliki kekayaan yang besar akan cenderung disalahgunakan, sehingga perlu adanya pengawasan dari masyarakat terhadap pemerintah daerah tersebut. Dampaknya publik perlu menuntut keterbukaan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, pemerintah daerah perlu mencari alternatif penyampaian informasi yang lebih efektif. Salah satu media yang bisa dilakukan adalah dengan mempublikasikannya melalui internet. Internet merupakan media informasi berbiaya murah dan mudah penyebarannya sehingga dapat mengurangi terjadinya asimetri informasi antara pemerintah daerah dan masyarakatnya.

Lasward *et al.* (2005) menyatakan peningkatan kekayaan suatu daerah akan berdampak pada usaha pemerintah untuk meningkatkan pelaporan keuangannya melalui internet. Kekayaan pemerintah daerah yang diprosikan dengan pendapatan daerah memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan pelaporan keuangan secara sukarela melalui *website* nya. Liestiani (2008) menemukan bahwa kekayaan daerah berhubungan dengan peningkatan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang di ajukan adalah:

H₁: *Local Government Wealth* berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi secara *online*.

Pengaruh *Intergovernmental Revenue* terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Secara Online

Intergovernmental revenue atau di Indonesia sering disebut dana perimbangan, merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi. Namun pada pelaksanaannya perlu adanya pengawasan sebagai bentuk keterbukaan dan akuntabilitas. Menurut Waliyyani & Mahmud (2015) peningkatan pengungkapan informasi keuangan biasanya didorong oleh oleh semakin besarnya *intergovernmental revenue*, hal ini disebabkan bentuk tanggungjawab pemda kepada pihak pemerintah pusat atas pengelolaan keuangannya. Pengungkapan dan pelaporan yang lengkap di LKPD merupakan bentuk akuntabilitas yang dapat dilaksanakan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan yang besar terhadap pemerintah pusat akan berdampak pada besarnya tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Namun Patrick (2007) menemukan *intergovernmental revenue* berdampak negative terhadap inovasi penerapan *Governmental Accounting Standard Board (GASB) 34*. Sehingga hipotesis penelitian ini:

H₂: *Intergovernmental Revenue* berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi secara *online*.

Pengaruh Opini Audit terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Secara Online

Persepsi publik akan opini selain WTP biasanya akan menimbulkan persepsi bahwa kemungkinan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh entitas terkait pengelolaan keuangannya, sehingga ada kecenderungan untuk tidak ingin mengungkapkan informasinya. Namun bagi pemda yang memperoleh opini WTP, akan cenderung mengungkapkannya secara *online* karena ingin menunjukkan kualitas pengelolaan keuangan yang dikelolanya dengan baik.

Handayani (2010), menemukan bahwa tingkat penyimpangan yang terjadi pada suatu entitas akan berdampak negatif terhadap tingkat pengungkapan. Entitas akan cenderung tidak mengungkapkan informasi jika tingkat penyimpangan semakin tinggi. Namun Nosihana dan Rizal (2016), menemukan opini tidak berpengaruh terhadap *internet financial reporting* melalui *e-government*. Sehingga hipotesis yang di ajukan adalah:

H₃: Opini Audit berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi secara *online*.

3. METODE PENELITIAN

Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kuantitatif asosiatif merupakan jenis penelitian ini karena meneliti pengaruh antara variabel yang satu dengan variabel lain, sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan analisis

kuantitatif. Variabel yang diteliti adalah pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi secara *online*, *local government wealth*, *intergovernmental revenue* dan opini audit. Sedangkan fokus penelitian ini pada laporan keuangan yang diungkapkan secara online tahun 2014-2017. Populasi penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi di Indonesia. Adapun pengukuran variabel penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.

Data pada penelitian ini merupakan data sekunder. Data diperoleh dengan mengakses berbagai *website* terkait dengan data yang diinginkan oleh peneliti sesuai tujuan penelitian. Adapun pengecualian untuk Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tidak diikutsertakan karena data terkait akses internet di rumah tangga masih digabung yang disajikan oleh BPS pada tahun 2014. Variabel pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi secara online diperoleh dengan mengakses situs resmi pemerintah provinsi di Indonesia. Data terkait *local government wealth* dan *intergovernmental revenue* diperoleh melalui situs resmi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Data terkait opini audit BPK diperoleh dari Indeks Hasil Pemeriksaan Semester 1 tahun 2018 di website BPK RI.

Pengukuran Variabel Penelitian

Tabel 1. Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel Penelitian	Pengukuran	Skala
Pengungkapan Laporan Keuangan secara <i>Online</i> (Y). Verawaty (2015)	Jika pemda melaporkan laporan keuangan secara <i>online</i> maka diberi angka "1", apabila tidak melaporkan maka diberi angka "0"	Nominal
<i>Local Government Wealth</i> (X1). Laswad <i>et al.</i> , (2005)	Ln Total Pendapatan Daerah	Rasio
<i>Intergovernmental Revenue</i> (X2). Setyaningrum dan Syafitri (2012)	$\frac{\text{Total Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$	Rasio
Opini Audit (X3). SPKN (2017)	Opini audit, yaitu (1) Tidak Memberikan Pendapat (TMP), (2) Tidak Wajar (TW), (3) Wajar Dengan Pengecualian (WDP), (4) Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP), (5) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Ordinal

Sumber: diolah penulis (2019)

Metode dan Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data regresi logistic dengan persamaan regresi logistik:

$$\text{Ln} \frac{p}{1-p} = b_0 + b_1 \text{Ln} X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Keterangan:

$\text{Ln} \frac{p}{1-p}$ = Pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi secara *online* (Y)

b_0 = Konstanta

Ln = Logaritma Natural

X_1 = *Local Government Wealth*

X_2 = *Intergovernmental Revenue*

X_3 = Opini Audit

b_1 - b_3 = Koefisien Regresi

e = error

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Data yang digunakan dalam penelitian sebanyak 128 data yaitu 32 provinsi dikalikan dengan tiga periode pelaporan (2014-2017). Hasil statistik deskriptik variabel penelitian ditunjukkan oleh tabel 2 berikut:

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	N	Min	Mak	Mean	S. Dev
Local Gov Wealth	128	27,82	31,80	29,29	0,86
Intergovernmental Revenue	128	4487 89,46	1896 9291,39	1141 44757,4	27836 5860,4
Opini Auditt	128	1	6	4,65	0,78
Pengungkapan Lap. Keu secara Online	128	0	1	0,56	0,50

Sumber: Data diolah (2019)

Kelayakan Model Regresi Logistik

Peneliti menguji kelayakan model regresi (*goodness of fit*) yakni dengan *Hosmer and Lemeshow Test*, menilai keseluruhan model regresi (*overall model fit*), dan kemudian mengetahui apakah semua variabel bebas atau salah satu variabel bebas berpengaruh terhadap variabel dependen dengan *Omnibus Tests of Model Coefficient*. Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, tidak ada masalah dalam model regresi logistic.

Adapun Nilai *Cox dan Snell R Square* serta *Nagelkerke R Square*, berdasarkan hasil output SPSS nilai *Cox dan Snell R* adalah 0,110 dan nilai *Nagelkerke R Square* adalah 0,147 yang artinya 14,7% variabel pengungkapan laporan keuangan secara *online* dipengaruhi oleh variabel independen yaitu *local government wealth*, *intergovernmental revenue* dan opini audit.

Hasil Uji Regresi Logistik

Hasil uji dengan menggunakan regresi logistic diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Logistik

	B	SE	Wald	df	Sig	Exp(B)
X1	0,944	0,299	9,983	1	0,002	2,570
X2	0,000	0,000	4,271	1	0,039	1,000
X3	-,320	0,274	1,368	1	0,242	0,726
Constant	- 25,65	8,699	8,696	1	0,003	0,000

Sumber: Data diolah (2019)

Berdasarkan hasil uji regresi logistik yang ditunjukkan oleh tabel 3 maka dapat disusun persamaan regresi logistik sebagai berikut:

$$\ln \frac{p}{1-p} = -25,652 + \ln 0,944 X1 + 0,000 X2 - 0,320 + e$$

Keterangan:

$\ln \frac{p}{1-p}$ = Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Secara *Online*

LN_{X1} = LN *Local Government Wealth*

X2 = *Intergovernmental Revenue*

X3 = Opini Audit

Berdasarkan hasil uji regresi logistik pada tabel 3, koefisien regresi variabel *local government wealth* adalah 0.944 dan tingkat signifikansi sebesar 0,002, lebih kecil dari 0,05 (5%). Artinya, variabel *local government wealth* yang di ukur dengan Ln *local government wealth* berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi secara *online*. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Lasward et al. (2005) yang menemukan kekayaan berpengaruh positif dan signifikan dengan tingkat pengungkapan informasi keuangan secara *online*.

Pemda yang melakukan pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi secara *online* berkeinginan menunjukkan bahwa kekayaan yang diperoleh dari pendapatan daerah dan akan dibelanjakan, sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Gilardi (2001) hubungan antara agen dan principal merupakan *chains of delegation*, yakni pendelegasian masyarakat kepada wakilnya di legislatif dan dari legislatif kepada eksekutif. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk

mempertanggungjawabkan apa yang dikelolanya kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan pendapatan daerah salah satunya juga diperoleh dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakatnya.

Pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi secara *online* yang dilakukan oleh pemda dapat meningkatkan kepercayaan pihak eksternal khususnya masyarakat terhadap pemda. Pengungkapan pelaporan keuangan secara *online* memberikan kemudahan bagi pihak eksternal untuk mengetahui seberapa besar pendapatan daerah yang menjadi penerimaan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Hasil uji regresi logistik pada tabel 4, koefisien *intergovernmental revenue* daerah sebesar 0,000 dan nilai signifikansi sebesar 0,039, lebih kecil dari 5% atau 0,05. Artinya, variabel *intergovernmental revenue* berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi secara *online*.

Hasil penelitian penulis berbeda dengan temuan Patrick (2007), Setyaningrum dan Syalitri (2012) dan Waliyyani & Mahmud, (2015) yang membuktikan adanya pengaruh negatif antara *intergovernmental revenue* terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi secara *online*. Namun penelitian ini konsisten dengan penelitian Sumarjo (2010) dalam Suhardjanto *et al.*, (2011) yang membuktikan pengaruh positif *intergovernmental revenue* terhadap tingkat pengungkapan dipemerintah daerah.

Lupia dan McCubbins (2000), mengungkapakan "*Teori prinsipal-agen menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (principal) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (agent) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal (terjadi pendelegasian wewenang). Pendelegasian terjadi ketika seseorang atau satu kelompok orang (prinsipal) memilih orang atau kelompok lain (agent) untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal.*"

Besarnya *intergovernmental revenue* yang digunakan untuk dibelanjakan, mengharuskan pemerintah pusat menuntut pemerintah daerah untuk mempertanggung-jawabkannya. Pada era otonomi daerah saat ini, perlu adanya pengawasan efektif dari pemerintah pusat untuk proses transparansi dan akuntabilitas. Pengawasan melalui BPKP dari fungsi pengawasan internal dan BPK RI dari pemeriksaan eksternal, mendorong pemerintah daerah untuk mengungkapkannya sebagai bentuk pertanggung-jawaban. Bentuk pertanggungjawaban dilakukan dengan pengungkapan laporan keuangan daerah secara *online*. Pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi secara *online* merupakan wujud tanggung jawab pemerintah provinsi dalam upaya mewujudkan trans-paransi informasi keuangan kepada masyarakat.

Hasil pada tabel 3, koefisien regresi variabel opini audit adalah -0,320 dan nilai signifikansi sebesar 0,242, lebih besar dari 0,05 (5%). Artinya, variabel opini audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi secara *online*.

Handayani (2010), menemukan bahwa tingkat penyimpangan yang terjadi pada suatu entitas akan berdampak negatif terhadap tingkat pengungkapan. Entitas akan cenderung tidak mengungkapkan informasi jika tingkat penyimpangan semakin tinggi. Namun Nosihana dan Rizal (2016), menemukan opini tidak berpengaruh terhadap pelaporan keuangan di internet melalui situs resmi pemerintah.

Berdasarkan data yang diperoleh, sejumlah pemda di Indonesia tetap melakukan pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi secara *online* walaupun masih belum memperoleh opini WTP. Sebaliknya ada beberapa provinsi yang mendapatkan opini WTP tetapi tidak pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi secara *online*. Artinya pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi secara *online* tidak tergantung opini audit atas laporan keuangan pemerintah provisi. Hal inilah yang diduga mengakibatkan tidak adanya pengaruh antara opini audit terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi secara *online*.

Menurut Mulgan (1997), "*dalam konteks sektor publik bisa dianalogikan bahwa hubungan prinsipal dan agen seperti hubungan antara masyarakat dengan pemerintah. Masyarakat adalah prinsipal dan pemerintah adalah agen. Prinsipal memberikan wewenang pengu-turan kepada agen dan memberikan sumberdaya kepada agen (dalam bentuk pajak dan lain-lain). Sebagai wujud pertanggungjawaban atas wewenang yang diberikan, agen memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap prinsipal.*" Pengungkapan laporan keuangan secara *online* merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah sebagai agen untuk memberikan informasi terkait laporan keuangan kepada masyarakat sebagai prinsipal untuk kemudahan akses informasi.

Pengungkapan hasil audit laporan keuangan berupa opini, merupakan bentuk transparansi kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban ke masyarakat sebagai prinsipal. Pengungkapan laporan keuangan secara *online* bisa menjadi media bagi pemerintah daerah dalam memberikan informasi terhadap

keuangan yang dikelolanya. Disisi lain masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah, disamping dapat berpartisipasi untuk kemajuan dan perkembangan daerahnya, melalui pengawasan terhadap pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah. Selain itu, pengungkapan laporan keuangan secara *online* dapat memberikan kemudahan bagi pemma untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan serta menyampaikan infor-masi kepada seluruh penduduk secara ekonomis, efektif, dan efisien.

5. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Variabel *local government wealth* yang di ukur dengan \ln *local government wealth* dan *intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi secara *online*. Sedangkan variabel opini audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi secara *online*.

Hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi bagi pemerintah daerah bahwa pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi secara *online* dipengaruhi oleh *local government wealth* dan *intergovernmental revenue*. Pengungkapan laporan keuangan secara *online* merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah sebagai agen untuk memberikan informasi terkait laporan keuangan kepada masyarakat sebagai prinsipal untuk kemudahan akses informasi.

Penelitian ini masih keterbatasan yaitu pengumpulan data terkait pengungkapan laporan keuangan secara online sebagaimana tidak secara langsung ada web pemerintah provinsi namun harus masuk dulu ke web sopd. Sebaiknya pemerintah provinsi perlu menyajikan data laporan keuangan secara *online* diweb pemerintah provinsi secara langsung untuk kemudahan akses masyarakat ketika membutuhkan informasi tersebut, dan bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya bisa lebih dalam melakukan riset dengan menambah pemerintah kabupaten/kota sebagai sampel penelitian. Pemerintah pusat perlu memberikan peringatan dan sanksi yang tegas bagi pemerintah daerah yang tidak mengungkapkan laporan keuangan secara *online*. Karena selama ini tidak ada sanksi apapun bagi pemerintah daerah yang tidak mengungkapkan laporan keuangan secara *online*. Sanksi tersebut misalnya dapat berupa pengurangan anggaran (misalnya DBH) yang diberikan kepada pemda. Peneliti selanjutnya juga dapat menambah variabel lain seperti jumlah penduduk, belanja, hutang dan jumlah anggota DPRD.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, M. D. T. K. (2014). Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet. *Prosiding SNA 17 Mataram*, 3. Lombok: Universitas Mataram.
- Dâmaso, M. G., & Lourenço, I. C. (2001). *Legitimacy Theory and Internet Financial Reporting*. Retrieved from [http://www.fep.up.pt/conferencias/10seminariogrudis/Dâmaso, Goretí \(Santarém\); Lourenço, Isabel \(ISCTE\), Legitimacy Theory and Internet Financial Reporting.pdf](http://www.fep.up.pt/conferencias/10seminariogrudis/Dâmaso, Goretí (Santarém); Lourenço, Isabel (ISCTE), Legitimacy Theory and Internet Financial Reporting.pdf)
- Djoko Suhardjanto, & Rena Rukmita Yulianingtyas. (2011). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kepatuhan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 8(1), 1-94.
- Gandía, J. L. (2008). Determinants of web site information by Spanish city councils. *Online Information Review*. <https://doi.org/10.1108/14684520810865976>
- Gilardi, F. (2001). Principal-agent models go to Europe: Independent regulatory agencies as ultimate step of delegation. *ECPR General Conference, Canterbury (UK)*.
- Handayani, S. (2010). Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Indonesia Tahun 2006. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 7(2), 143-154.
- Laswad, F., Fisher, R., & Oyelere, P. (2005). Determinants of voluntary Internet financial reporting by local government authorities. *Journal of Accounting and Public Policy*. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2004.12.006>
- Lupia, A., & McCubbins, M. D. (2000). Representation or abdication? How citizens use institutions to help delegation succeed. *European Journal of Political Research*. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.00514>
- Mulgan, R. (1997). The processes of public accountability. *Australian Journal of Public Administration*. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8500.1997.tb01238.x>
- Nor, W., Hudaya, M., & Novriyandana, R. (2019). Financial statements disclosure on Indonesian local government websites. *Asian Journal of Accounting Research*, 4(1), 112-128. <https://doi.org/10.1108/ajar-06-2019-0043>
- Nosihana, A., & Yaya, R. (2016). Internet Financial Reporting dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya

- Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2), 89-104. <https://doi.org/10.24815/jdab.v3i2.5389>
- Patrick, P. (2007). *The Determinants of Organizational Innovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government*. (May), 36. Retrieved from https://etda.libraries.psu.edu/files/final_submissions/4828
- Pemerintah Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*. , (2005).
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. , (2008).
- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 154-170. <https://doi.org/10.21002/jaki.2012.10>
- Verawaty. (2015). Determinan Aksesibilitas Internet Financial Reporting melalui E-Government Pemerintah Daerah di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi*.
- Waliyyani, G. M. A. M. (2015). Pengaruh Karakteristik Pemerintah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 4(2), 1-8.

